



# Jakarta Berhak Usul Program

## Dana Hibah Diwajibkan Bersinergi Dengan Program Utama DKI

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta berhak mengusulkan program terkait kepentingan sendiri dalam pemberian dana hibah untuk daerah mitra, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Usulan program yang sinergi dengan pembangunan Jakarta akan mempercepat penanggulangan masalah di Ibu Kota, seperti persoalan kemacetan dan banjir.

setiap pemerintah daerah mitra harus menjelaskan secara rinci rencana program membantu Jakarta dalam penanganan banjir dan kemacetan di wilayah masing-masing.

Proposal itu, lanjut Heru, akan ditampung di unit pengelola teknis. Proposal kemudian dikaji oleh tim untuk dinilai sejauh mana kebutuhan dan relevansi proposal. Setelah anggaran cair, penggunaan dana juga akan diaudit oleh auditor negara, yakni Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

"Tujuan pengucuran dana hibah ini untuk membantu Jakarta

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Kamis (19/2), mengatakan, untuk Kabupaten Bogor, misalnya, Ibu Kota bisa ikut mengusulkan penggunaan dana agar program pembongkaran bangunan ilegal di Puncak berlanjut.

"DKI punya hak untuk mengusulkan program tersebut," kata Heru. Ke depan, daerah mitra diminta mengakomodasi kepentingan Jakarta sebagai pemberi dana hibah.

Setiap daerah mitra wajib mengajukan proposal permohonan dana hibah tahun anggaran 2015. Di dalam proposal, dalam mengatasi persoalan banjir dan macet, seperti normalisasi kali, pembangunan jalan inspeksi, atau pembangunan saluran penghubung," kata Heru.

Dana hibah yang disetujui untuk daerah mitra pada tahun ini senilai Rp 358 miliar. Dana itu

untuk Kabupaten Bogor Rp 67,4 miliar, Kota Tangerang Rp 100 miliar, Kota Bekasi Rp 98,1 miliar, Kota Tangerang Selatan Rp 74,8 miliar, dan Kabupaten Tangerang Rp 17,7 miliar.

### Program tidak berlanjut

Pemerintah Kabupaten Bogor ternyata tak mencantumkan rencana lanjutan pembongkaran bangunan ilegal sebagai bagian dari pemanfaatan dana hibah. Padahal, kegiatan serupa sudah diwujudkan pada 2013-2014 dengan pembongkaran 231 bangunan. Masih ada sekitar 300 bangunan yang disegel karena tidak berizin dan menjadi tidak jelas akan dibongkar atau tidak.

Pelaksana Tugas Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan, dana hibah untuk penanganan banjir digunakan dalam program membangun kolam bioretensi, sumur resapan, dan penanaman pohon di Daerah Aliran Sungai Ciliwung dan Angke, pembebasan lahan dan proyek sodetan Situ Cikaret dan Situ Kabantenan, serta pembangunan instalasi pengolahan air limbah di tepi sungai di Jonggol, Cibinong, dan Citarunggul.

"Komunikasi antara Jakarta dan daerah mitra dalam pemanfaatan dana hibah tidak selaras," kata Koordinator Konsorsium Penyelamatan Puncak Ernan Rustiandi. Ada kesan program dijalankan untuk menghabiskan dana hibah yang diragukan apakah efektif dan efisien membantu Jakarta menangani banjir dan macet.

### Dana kurang

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, dana hibah yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 untuk sejumlah proyek, seperti pembangunan jalur *elevated* bus transjakarta yang terintegrasi dengan bus transjakarta Koridor XIII rute Tendea-Ciledug (Jakarta Selatan).

Dana itu juga digunakan untuk proyek antisipasi banjir, seperti penataan saluran Situ Cipondoh ke Kali Deres dan Kali Mookervart serta perbaikan jalan rusak, terutama di wilayah perbatasan.

"Dana hibah belum termasuk proyek normalisasi Kali Angke, Cisadane, Sabi, Ledug, Cirarab, dan Situ Bulakan," kata Arief.

Sebenarnya, menurut Arief, kebutuhan anggaran untuk penanganan banjir di Kota Tangerang sangat besar. Kebutuhan normalisasi Kali Cisadane membutuhkan anggaran Rp 1,9 triliun dan Kali Sabi Rp 200 miliar. Belum lagi kebutuhan untuk pembangunan tanggul di sekeliling Kali Ledug dan Cirarab serta upaya menambah daya tampung Situ Bulakan menjadi 1 juta meter kubik atau dua kali lipat kapasitas saat ini.

"Sistem polder ini saja sedikitnya butuh Rp 500 miliar. Tetapi, dana yang kami peroleh untuk normalisasi sebesar Rp 90 miliar saja," ujar Arief. (FRO/BRO/PIN)